

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
KELANJUTAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM
DI DALAM NEGERI



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

**MATRIKS LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 7 TAHUN 2023 KELANJUTAN
PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM
DI DALAM NEGERI**

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1	Kebijakan terhadap kondisi perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri yang telah memasuki tahap <i>commisioning</i> , tetapi masih memerlukan tambahan waktu hingga dapat berproduksi secara optimal dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.	Permen ESDM No. 7/2023 perlu untuk dicabut	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.	Telah diundangkan melalui Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri pada tanggal 30 Mei 2024.

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
2	Ruang lingkup pengaturan nanti diberikan kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng.			
3	Perlu pengaturan terkait dengan jangka waktu guna mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian Mineral logam di dalam negeri oleh pemegang IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi			
4	Terdapat pengaturan kriteria bagi pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri antara lain adanya kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah menyelesaikan tahap kegiatan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	penyelesaian mekanik paling lambat sampai dengan tanggal yang ditentukan dan membayar bea keluar sesuai peraturan perundang-undangan.			



Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum,

Bambang Sujito